GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Jurnal nasional **Tgl/Bln/Thn : 23 November 2007**

Subyek : Perubahan Iklim **Hari : Jumat**

Halaman : 06

Perubahan Iklim Memperbesar Kerugian Ekonomi

Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim bagi Indonesia cukup signifikan. Dari tahun 2001 hingga 2004 telah terjadi 530 peristiwa banjir. Begitu pula dengan frekuensi kekeringan, dan kebakaran hutan yang terus meningkat. Hal ini disampaikan Raldi Hendro Koestoer, Staf Ahli Bidang Inovasi, Teknologi dan Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam sebuah seminar bertema Kondisi Lingkungan dan Perekonomian Indonesia, bertempat di kantor BPPT, kemarin (22/11).

"Kegagalan panen juga meningkat. Data penelitian menunjukkan dalam tahun 1981 hingga 1990 kita kehilangan produksi padi sekitar 100 ribu ton per tahun. Dari tahun 1991 hingga 2000 meningkat menjadi 300 ribu ton per tahun," kata Hendro.

Kerugian ekonomi dalam skala dunia juga makin besar. Dibanding tahun 1950-an, kerugian meningkat hingga 14 kali lipat atau sekitar US$50-100 miliar.

Mengenai skema pemberian insentif bagi negara berkembang yang melakukan upaya pengurangan emisi dari deforestasi yang dikenal sebagai RED (Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries), yang berubah menjadi REDD dengan ditambahkannya degradasi dan konservasi yang merupakan usulan Indonesia, menurutnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai alternatif terhadap Belanja Anggaran Umum (BAU).

Menurut Hendro, World Bank (WB) memberikan dukungan besar untuk sistem insentif pasca-2012 (termasuk REDD). Jika tahun 2012 WB menyediakan dana untuk pilot carbon sebesar US$200 juta, pada 2014 mencapai US$1.000 juta.

Terkait dengan masuknya investasi dari luar, Hendro menyarankan untuk memperhatikan apakah perusahaan tersebut bankable.

"Kalau ya, biasanya memenuhi sejumlah syarat termasuk ecolable. Bisa juga dengan melihat apakah perusahaan tersebut menggunakan standar dari Uni Eropa yang telah menjalankan kebijakan green investment secara efektif."

Masnellyarti Hilman, Deputi Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam acara yang sama mengatakan, meskipun sebagai negara berkembang tidak diwajibkan, ada beberapa skenario yang dijalankan Indonesia dalam mitigasi. Antara lain dalam penggunaan energi telah ada kebijakan untuk menggunakan energi terbarukan lewat Inpres No 1 Tahun 2006. Selain itu Indonesia aktif melakukan konservasi, dan mengurangi hot spot kebakaran hutan.

Terkait REDD, Masnellyarti menjelaskan, Indonesia memandang penting adanya skema pembayaran yang jelas dari negara maju kepada negara berkembang.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

"Pada tahun 2008 harus sudah ada pilot project metode yang tepat atas insentif bagi negara-negara yang mengupayakan pencegahan deforestasi," katanya.

Usulan yang ingin dibawa Indonesia dalam konferensi Bali menurutnya adalah diterimanya prinsip yang sama namun berbeda dalam hal tanggung jawab antara negara maju dan berkembang, negara maju berada di depan dalam menurunkan efek rumah kaca, negara berkembang mendapat insentif bagi mereka yang secara serius mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu transfer teknologi, membagi secara jelas kesepakatan apa saja yang akan diputuskan pada pertemuan Bali, Polandia dan Denmark, serta mendesak negara yang belum menandatangani Protokol Kyoto agar segera bisa meratifikasinya.

Di tempat terpisah, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana penanggulangan dampak perubahan iklim dalam sebuah draft Rencana Aksi Naisonal (RAN).

"Rencana ini nantinya akan menjadi acuan dasar bagi semua komponen bangsa dalam menghadapi dan menyikapi ancaman perubahan iklim dan pemanasan global," katanya dalam sebuah seminar tentang perubahan iklim di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, meski RAN tersebut sudah memiliki lingkup yang menyeluruh, termasuk di dalamnya skema mekanisme pembangunan bersih (CDM), namun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Di antaranya, pendekatan cluster dalam mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi berdasarkan sektoral, geografis, jenis bencana akibat perubahan iklim, dan sosioekonomi. Selain itu pengurangan emisi karbon juga harus dilihat sebagai investasi, bukan *liability* bagi masyarakat dan dunia usaha. **n**
Nuswantoro/Cinita Analen

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP